

RENCANA KERJA



2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dapat terwujud. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2026.

Bengkalis, Oktober 2025
Kepala Dinas Perikanan,



TASRIL AKMAL, S.Pi, M.Si
NIP. 19760829 201102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tahun 2021- 2026.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	26
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	28
2.4. Review terhadap RKPD 2026.....	28
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	37
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	39
3.3. Program dan Kegiatan.....	39
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
 PENUTUP.....	53
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- 2). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026;
- 7). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Perikanan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;

- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.
- 1.3. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.
- 1.4. Sistematika Penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2026). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perikanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perikanan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perikanan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan tahun 2026 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 19.828.443.895 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 18.935.973.895 dan Belanja Modal sebesar Rp. 892.470.000. Kedua jenis belanja tersebut digunakan untuk membiayai 1 urusan, 5 program, 16 Kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4.1 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6.1 Pengadaan Mebel
 - 6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- B. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 1.2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 1.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - 2.2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Keci
- C. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 - 1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
 - 1.2 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 1.5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- 1.6 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

D. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - 2.1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3.1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2026 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 92,57% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember 2024).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pertanian dan Tata Ruang dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2025 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (<i>output/Sub Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatans/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan RealisasiCapaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									(TW 1 tahun2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01										
01	2	01								
01	2	01	01							
01	2	01	06							

01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan verifikasi program dan kegiatan dikecamatan dalam 1 tahun	66 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	11 kecamatan	100	11 kecamatan	-	-
01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam 1 tahun	600%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun; 2. Pakaian kerja lapangan tenaga keamanan	108 orang	18	18	17	94,44%	17 orang	-	-
01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
01	2	05	11	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan tekhnis dalam 1 tahun	120 orang	20 orang	24	21	87,5%	20	-	-

01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penera ngan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	60 jenis	10 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	10 jenis	-	-
01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor daan peralatan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	12 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	-	-
01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 Tahun	24 item	4 item	4 item	4 item	100%	4 item	1 item	25%
01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan dalam 1 tahun	96 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100%	16 jenis	-	-
01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase terlaksananya rapat	150 media	25 media	25 media	25 media	100%	25 media	-	-

						koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun								
01	2	06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1. Jumlah tenaga operator website;2. Prosentase operasional website dinas dalam 1 tahun	600%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
01	2	07	01		Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan dalam 1 tahun	5 unit	1 unit	1 unit	3 unit	300%	-	-	-
01	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan dalam 1 tahun	60 jenis	10 jenis	10 jenis	2 jenis	20%	10 jenis	-	-
01	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang disediakan dalam 1 tahun	60 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	-	-
01	2	07	11		Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang	9 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	-

					disiapkan dalam 1 tahun								
01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Jumlah benda pos yang disediakan ;2.Jumlah tenaga administrasi dalam 1 tahun	24 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	4 orang	-
01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik dalam 1 tahun	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan
01	2	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	3 bulan
01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	6 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	-
01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang	30 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	-

				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara dalam 1 tahun								
01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam 1 tahun	24 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	1 unit	25%
01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	60 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	-	-
01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab dan tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	102 orang	17 orang	17 orang	17 orang	100%	17 orang	-	-
01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 paket	-	2 paket	2 paket	100%	1 paket	-	-
03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									

03	2	01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
03	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1. Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat; 2. Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan	6 dokumen ; 90 orang	1 dokumen ; 15 orang	1 dokumen ; 15 orang	1 dokumen ; 15 orang	100%	1 dokumen ; 15 orang	-	-
03	2	01	02	Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Prosentase terlaksananya bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	7 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-
03	2	01	03	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Prosentase terlaksananya bantuan sarana usaha perikanan tangkap	600%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
03	2	02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah									

				Kabupaten/Kota									
03	2	02	01	Pengembangan kapasitas nelayan	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dilatih dalam 1 tahun	90 kelompok	-	20 kelompok	4 kelompok	20%	20 kelompok	-	-
03	2	02	02	Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Peningkatan dan pembinaan kelembagaan usaha dibidang perikanan tangkap	100 kelompok	20 kelompok	15 kelompok	30 kelompok	200%	15 kelompok	-	-
03	2	02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang terfasilitasi untuk menjadi peserta asuransi nelayan dan peserta SEHAT	3000 orang	500 orang	500 orang	307 orang	61,4 %	500 orang	-	-
03	2	04		Penerbitan Tanda Daftra Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

03	2	04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah standar operasional (SOP) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-
03	2	04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap dalam mengurus tanda daftar kapal	600 unit	100 unit	-	-	-	-	-	-
03	2	05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
03	2	05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal Penangkap Ikan dan	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) Penerbitan Persejutan	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

				Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Pengadaan Kapal Perikanan								
03	2	05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Prosentase terlaksananya pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan sampai dengan 10 GT	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
03	2	06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
03	2	06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) penerbitan persyaratan dan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT	2 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-

03	2	06	02	Pelayanan Penerbitan pendaftaran Kapal Perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT	Prosentase penerbitan pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT	4 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-
04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA									
04	2	01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
04	2	01	01	Pelayanan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal	Jumlah standar operasional (SOP) penerbitan persyaratan dan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

				Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing									
04	2	01	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pemmbudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Prosentase terlaksananya pelayanan penerbitan izin usaha perikanan budidaya	12 pelaku usaha	-	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	100%	-	-	-
04	2	02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil									
04	2	02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100%	10 kelompok	-	-
04	2	02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Prosentase terlaksananya pembentukan dan pengembangan	20 kelompok	-	20 kelompok	21 kelompok	105%	4 kelompok	-	-

				kecil	kelompok pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun								
04	2	02	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, bantuan Pembiayaan, Kemitraan usaha	Jumlah pembudidaya ikan yang difasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha	100 pembudidaya	-	20 pembudidaya	-	-	-	-	-
04	2	02	04	Pemberian pendampingan, kemudahan akses, ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jumlah terlaksananya pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, informasi, pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun	24 kali	4 kali	-	-	-	-	-	-
04	2	03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
04	2	03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu)	Jumlah standar operasional (SOP) penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	-

				Daerah Kabupaten/Kota									
04	2	03	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengurus TDPIK dalam 1 tahun	60 pelaku usaha	-	-	-	-	-	-	-
04	2	04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan									
04	2	04	01	Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudida ikan dalam 1 tahun	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
04	2	04	02	Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Jumlah bantuan prasarana usaha perikanan budidaya	25 unit	4 unit	5 unit	2 unit	40%	5 unit	-	-
04	2	04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase tersedianya bantuan sarana pembudidaya ikan dalam 1 tahun	60 kelompok		11 kelompok	11 kelompok	100%	10 kelompok	-	-
04	2	04	04	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kbaupaten/Kota	Jumlah sampel pengujian kesehatan ikan dan lingkunganBeng kalis	600 sampel	100 sampel	100 sampel	80 sampel	80%	100 sampel	-	-

04	2	04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang menerapkan CBIB 1 tahun	100 pembudidaya	-	20 pembudidaya	20 pembudidaya	100%	20 pembudidaya	-	-
04	2	04	06	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan darat	Jumlah laporan pengembangan dan pemanfaatan lahan usaha budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
04	2	04	07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya ikan di Darat	Jumlah laporan pengembangan usaha budidaya perikanan melalui bioteknologi	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									
05	2	01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									
05	2	01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai,	Jumlah kawasan perikanan tangkap yang	30 kawasan	6 kawasan	6 kawasan	2 kawasan	33,33%	6 kawasan	-	-

				Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	diawasi dalam 1 tahun								
05	2	01	02	Pengawasan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah usaha perikanan budidaya yang diawasi dalam 1 tahun	30 kawasan	-	6 kawasan	-	-	-	-	-
06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									
06	2	01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil									
06	2	01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
06	2	02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									

06	2	02	01	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Frekwensi terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pengolahan dan pemasaran	30 kali	5 kali	5 kali	2 kali	40%	5 kali	-	-
06	2	03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
06	2	03	01	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pemberian pangan berbahan ikan	12000 orang	350	500	300	60%	500	-	-
06	2	03	02	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam 1 tahun	60 kelompok	-	10 kelompok	7 kelompok	70%	10 kelompok	-	-

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2025, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu kewenangan kabupaten yang terbatas dalam pengelolaan perikanan tangkap di perairan laut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada tahun 2024 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Perikanan Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut :

- a. Produktivitas Perikanan pada tahun 2024 sebesar 11.743,71 ton dari 6.678 ton atau dengan prosentase capaian sebesar 175,86%.
- b. Angka konsumsi Ikan pada tahun 2024 sebesar 47,41 kg/kapita/tahun dari target 2024 sebesar 42,94 kg/kapita/tahun atau dengan prosentase capaian sebesar 111,13%.
- c. Produktivitas olahan perikanan pada tahun 2024 sebesar 101,93 ton dari target sebesar 100 ton atau dengan prosentase capaian sebesar 101,93%.

Tabel T-C.30.

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn-2)	Tahun 2023 (thn-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thnn-1)	Tahun 2024 (thnn-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thnn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
1.	Jumlah total produksi perikanan (ton)			6765	6678	6591	6504	6.033,58	11.743,71	9.128	9.128	
2.	Pendapatan rata-rata nelayan (Rp. Juta/tahun)			41,6	43,5	45,6	47,8	106,19	-	-	-	
3.	Angka konsumsi ikan (kg/Kapita/tahun)			41,87	42,11	42,94	43,20	42,15	47,41	43,20	43,20	
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan					100	100	-	101,93	100	100	
5..	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi Dinas yaitu penyelenggaraan dalam kelaterdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Bengkalis pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang. Adapun Isu-isu tersebut antara lain :

- 1). Maraknya kegiatan budidaya udang vanamei oleh masyarakat pembudidaya ikan di kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Bukit Batu, Bandar Laksamana, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara.
- 2). Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- 3) Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah tangkapan Ikan yang diperbolehkan, dan Tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dimana untuk Perairan Selat Malaka dan Laut Andaman jumlah tangkapan yang diperbolehkan rata-rata hanya 50% dari potensi yang ada terhadap beberapa jenis ikan atau dengan kata lain telah terjadi over fishing di wilayah perairan tersebut.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap RKPD tahun 2026 Kabupaten Bengkulu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Bengkulu

No	RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			12.215.782.841	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		BB	12.934.429.453	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran dan kinerja			500.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan capaian perencanaan, penganggaran dan kinerja		100%	150.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kab. Bengkulu	1 dok	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	2 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Frekuensi pertemuan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	2 kali	150.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	2 laporan	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan verifikasi program dan kegiatan di kecamatan dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	11 Kec	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	1 laporan	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu		100%	8.335.942.577	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan iuran wajib ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu		100%	10.025.029.453	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	100%	8.335.942.577	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu	100%	10.025.029.453	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah		100%	319.049.596	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pendataan dan penataan barang milik perangkat daerah		100%	376.400.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	18 orang	272.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengumuman Barang Milik Daerah	Kab. Bengkulu	1 Dokumen	326.400.000	
							Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun		17 orang		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik perangkat daerah yang teregistrasi dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	1 dok	47.049.596	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Bengkulu		50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	89.930.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis dalam 1 tahun		20 orang	89.930.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 orang	50.000.000	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor			100%	1.105.519.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor			100%	1.137.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	10 Jenis		40.625.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket		41.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat tulis kantor dan peralatan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	2 paket		144.480.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket		100.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	4 item		120.400.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket		102.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang tidak tetap dan penggandaan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	16 jenis		70.314.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket		80.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media massa yang menjadi langganan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	25 media		29.700.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Bengkalis	40 media		42.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam 1 tahun		100%		550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	1 laporan		650.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase operasional website dinas dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	100%		150.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bengkalis	1 dokumen		122.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		100%		300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah		100%		100.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	5 jenis		100.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 unit		50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	10 jenis		200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bengkalis	5 unit		50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		699.200.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		508.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan tenaga administrasi yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	4 orang		80.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Bengkalis	1 laporan		69.600.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	12 bulan		400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan		350.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	12 bulan		200.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan		50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 orang		19.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan		38.400.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah		100%		866.141.668	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan perangkat daerah		100%		588.000.000	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	5 unit	122.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Bengkulu	5 unit	150.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	4 unit	122.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bengkulu	4 unit	150.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	10 unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Bengkulu	10 unit	19.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab dan tenaga kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	17 orang	522.141.668	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Bengkulu	6 unit	268.800.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		92,83%	1.599.420.414	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)		5.265	3.108.400.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap		92,83%	1.075.128.000	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap		92,83%	814.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat	Kab. Bengkulu	1 dok	751.628.000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat	Kab. Bengkulu	1 dok	664.000.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah bantuan prasarana usaha perikanan tangkap	Kab. Bengkulu	1 unit	323.500.000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Kab. Bengkulu	3 unit	150.000.000	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitasi nelayan kecil		92,83%	524.292.414	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya penguatan kelembagaan, usaha dan fasilitasi nelayan kecil		92,83%	2.294.400.000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dilatih dalam 1 tahun	Kab. Bengkulu	20 kelompok	125.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Kab. Bengkulu	60 orang	319.200.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Peningkatan dan pembinaan kelembagaan usaha di bidang perikanan tangkap	Kab. Bengkulu	15 kelompok	199.292.414	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kab. Bengkulu	15 kelompok	88.400.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah nelayan yang difasilitasi dalam penerbitan asuransi nelayan dan SEHAT	Kab. Bengkulu	500 orang	200.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Bengkulu	4 Unit Usaha	50.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab. Bengkulu		200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kab. Bengkulu		1.836.800.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		95,88%	1.112.835.198	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		98,75%	2.948.000.000	

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan		95,88%	1.112.835.198	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan		98,75%	2.948.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	310.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	236.800.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan prasarana usaha perikanan budidaya	Kab. Bengkalis	5 Unit	270.441.354	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bengkalis	5 Unit	200.000.000	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bantuan sarana usaha perikanan budidaya	Kab. Bengkalis	10 kelompok	262.393.844	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Kab. Bengkalis	15 unit	2.358.400.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Kab. Bengkalis	100 sampel	270.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	152.800.000	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya		94,00%	400.000.000	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya		97,00%	72.000.000	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan		94,00%	400.000.000	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengawasan sumberdaya perikanan		97,00%	72.000.000	
Operasi Kapal Pengawas Perikanan		Kab. Bengkalis		400.000.000	Operasi Kapal Pengawas Perikanan		Kab. Bengkalis		72.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tingkat konsumsi ikan		97,59%	1.024.736.552	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)		42,92	614.800.000	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala miko dan kecil		97,59%	121.926.383	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala miko dan kecil		97,59%	71.600.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 dok	121.926.383	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bengkalis	1 dokumen	71.600.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		97,59%	188.971.843	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase terlaksananya bimbingan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil		98,18%	121.600.000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Kab. Bengkalis		188.971.843	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		Kab. Bengkalis		121.600.000	

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan pelatihan pengolahan		97,59%	713.838.326	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan dan pelatihan pengolahan		98,18%	421.600.000	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian pangan berbahan ikan	Kab. Bengkalis	2000 orang	468.639.463	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Bengkalis	1000 ton	150.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang difasilitasi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	10 kelompok	245.198.863	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Kab. Bengkalis	5 pelaku usaha	271.600.000	
JUMLAH				16.352.775.005					19.677.629.453	

Berdasarkan review atas RKPD tahun 2026 dan analisa kebutuhan tahun 2026 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dapat diketahui bahwa kebutuhan Anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 19.677.629.453,- atau lebih sebesar Rp. 3.324.854.448,- dari RKPD tahun 2026 sebesar Rp. 16.352.775.005,- . Kelebihan pagu anggaran tersebut berasal dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari pagu RKPD sebesar Rp. 12.215.782.841 menjadi Rp. 12.934.429.453,-. Kenaikan ini dibutuhkan karena diperkirakan adanya kenaikan harga barang dan jasa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Penggunaan Anggaran tersebut direncanakan untuk :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
 - b. Pembayaran Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Operasional Website dan Tenaga Administrasi Kantor
 - c. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, Gedung dilingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
 - d. Penyediaan Komunikasi, Listrik, Makanan dan Minum, Alat Tulis Kantor, Bahan Cetak dan lainnya untuk operasional kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada tahun 2026 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 3.108.400.000,- atau lebih besar dari pagu RKPD sebesar Rp. 1.508.979.586,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk :
 - a. Pembangunan tambatan perahu sebanyak 3 unit
 - b. Pemberian bantuan sarana penangkapan ikan untuk perairan umum daratan berupa Kapal/Perahu lengkap dengan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan sebanyak 2 paket(unit)
 - c. Workshop berupa pelatihan Mata Pencarian Alternatif (MPA) bagi keluarga nelayan kecil di Kabupaten Bengkalis dan pemberian bantuan penggantian alat tangkap nelayan perairan laut yang mengalami kerusakan. Dimana direncanakan kegiatan workshop dan pemberian bantuan tersebut direncanakan untuk 60 orang nelayan.
 - d. Pembentukan dan pengembangan kelompok nelayan di Kabupaten Bengkalis sebanyak 15 kelompok.
 - e. Pemberian fasilitas bantaun pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha untuk 4 unit usaha.
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada tahun 2025 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.948.000.000,- atau lebih besar dari pagu RKPD sebesar Rp. 1.112.835.198,-. Anggaran tersebut direncanakan akan dipergunakan untuk :

- a. Penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan sebanyak 5 unit.
 - b. Pemberian bantuan sarana pembudidayaan untuk 15 kelompok/unit pembudidaya ikan.
 - c. Bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan analisa terhadap kesesuaian lahan budidaya di Kabupaten Bengkalis.
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 72.000.000,- yang direncanakan untuk melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di perairan umum daratan atas 5 kawasan perairan umum daratan di Kabupaten Bengkalis

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2026. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2026.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2026 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan kelautan dan perikanan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perikanan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Sampai saat ranwal ini disusun, belum ada usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan karena belum ada musrenbang baik itu tingkat desa maupun kecamatan					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dinas Perikanan dalam menjabarkan kebijakan nasional telah diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang mengikuti kebijakan daerah yang tertuang didalam RPJMD, adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Memelihara keberlanjutan sumberdaya Perikanan;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha perikanan budidaya air payau (brackish water) dan budidaya air tawar;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur Perikanan;
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan nelayan, budidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan melalui pendampingan dan pelatihan serta penyuluhan.
- e. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam memanfaatkan sumberdaya Perikanan.
- f. Mengatur usaha perikanan tangkap agar efisien dan lestari.
- g. Mendorong pengembangan usaha pasca panen.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2026 menggunakan tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026.

Tujuan :

I. Meningkatkan produksi perikanan

Sasaran :

1. Meningkatkan produksi usaha perikanan
Indikator : Jumlah produksi perikanan
2. Meningkatkan tingkat konsumsi ikan
Indikator : Angka tingkat konsumsi ikan
3. Pendapatan rata-rata nelayan
Indikator : Jumlah pendapatan rata-rata nelayan

II. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Tahun 2026 sebagai mana Tabel TC-33.

**Tabel T-C 33. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu
Tahun 2026**

Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rancangan Awal Renja Tahun 2026			Catatan Penting (alasan penambahan)	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	10	11	12
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		BB	12.934.429.453		BB	12.733.516.614
3.25.01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	150.000.000		100%	300.000.000
3.25.01. 2. 01. 0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	2 dokumen	50.000.000		2 dokumen	200.000.000
3.25.01. 2. 01. 0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Bengkulu	2 laporan	50.000.000		2 laporan	50.000.000
3.25.01. 2. 01. 0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	1 laporan	50.000.000		1 laporan	50.000.000
3.25.01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	10.025.029.453		100%	8.812.769.654
3.25.01. 2. 02. 0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu	47 Orang/Bulan	10.025.029.453		47 Orang/Bulan	8.812.769.654
3.25.01. 2. 03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	376.400.000		100%	376.400.000
3.25.01. 2. 03. 0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkulu	1 Dokumen	326.400.000		1 Dokumen	326.400.000
		Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun		17 orang			17 orang	
3.25.01. 2. 03. 0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Bengkulu	1 Laporan	50.000.000		1 laporan	50.000.000
3.25.01. 2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	50.000.000		100%	100.000.000

3.	25.	01.	2.	05.	0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kab. Bengkalis	20 orang	50.000.000		20 orang	100.000.000
3.	25.	01.	2.	06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	1.137.000.000		100%	1.193.100.000
3.	25.	01.	2.	06.	0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket	41.000.000		2 paket	45.000.000
3.	25.	01.	2.	06.	0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket	100.000.000		2 paket	145.000.000
3.	25.	01.	2.	06.	0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket	102.000.000		2 paket	125.000.000
3.	25.	01.	2.	06.	0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 paket	80.000.000		2 paket	71.000.000
3.	25.	01.	2.	06.	0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Bengkalis	35 dokumen	42.000.000		35 dokumen	39.600.000
3.	25.	01.	2.	06.	0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat	Kab. Bengkalis	1 laporan	650.000.000		1 laporan	700.000.000
3.	25.	01.	2.	06.	0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bengkalis	2 dokumen	122.000.000		2 dokumen	67.500.000
							Jumlah tenaga operator website		3 orang/bulan			3 orang/bulan	
3.	25.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100.000.000		100%	300.000.000
3.	25.	01.	2.	07.	0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 unit	50.000.000		2 unit	100.000.000
3.	25.	01.	2.	07.	0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Bengkalis	5 unit	50.000.000		5 unit	200.000.000
3.	25.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	508.000.000		100%	726.246.960
3.	25.	01.	2.	08.	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Bengkalis	1 laporan	69.600.000		1 laporan	80.000.000
							Jumlah tenaga administrasi kantor		4 orang/bulan			4 orang/bulan	
3.	25.	01.	2.	08.	0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Bengkalis	1 laporan	350.000.000		1 laporan	400.000.000
3.	25.	01.	2.	08.	0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kab. Bengkalis	1 laporan	50.000.000		1 laporan	200.000.000
3.	25.	01.	2.	08.	0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Bengkalis	2 laporan	38.400.000		2 laporan	46.246.960

						Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun		1 orang			1 orang	
3.	25.01.	2.	09.			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	588.000.000		100%	925.000.000
3.	25.01.	2.	09.	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Kab. Bengkalis	5 unit	150.000.000		5 unit	150.000.000
3.	25.01.	2.	09.	0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Kab. Bengkalis	5 unit	150.000.000		5 unit	150.000.000
3.	25.01.	2.	09.	0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Bengkalis	10 unit	19.200.000		10 unit	100.000.000
3.	25.01.	2.	09.	0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Kab. Bengkalis	6 unit	268.800.000		6 unit	525.000.000
						Jumlah tenaga kebersihan kantor		13 orang			17 orang	
3.	25.03.					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		5.558	3.108.400.000		5.558	2.860.000.000
3.	25.03.	2.	01.			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		94,23%	814.000.000		94,23%	1.360.000.000
3.	25.03.	2.	01.	0001.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat	Kab. Bengkalis	1 dok	664.000.000		1 dok	760.000.000
						Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan		16 orang			16 orang	
3.	25.03.	2.	01.	0002.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang	Kab. Bengkalis	2 unit	150.000.000		2 unit	600.000.000
3.	25.03.	2.	02.			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		94,23%	2.294.400.000		94,23%	1.500.000.000
3.	25.03.	2.	02.	0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Kab. Bengkalis	40 orang	319.200.000		50 orang	150.000.000
3.	25.03.	2.	02.	0002.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembaganya	Kab. Bengkalis	15 kelompok	88.400.000		20 kelompok	250.000.000
3.	25.03.	2.	02.	0003.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Bengkalis	4 Unit Usaha	50.000.000		4 Unit Usaha	100.000.000
3.	25.03.	2.	02.	0004.	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Jumlah sarana dan prasarana usaha nelayan skala kecil	Kab. Bengkalis	500 Unit Usaha	1.836.800.000		500 Unit Usaha	1.000.000.000

3.25.04.					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)		3.570	2.948.000.000		3.570	1.100.000.000
3.25.04.	2.	04.			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			98,75%	2.948.000.000		98,75%	1.100.000.000
3.25.04.	2.	04.	0001.		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	236.800.000		1 Dokumen	300.000.000
						Jumlah tenaga operator dan pendamping budidaya		7 orang			7 orang	
3.25.04.	2.	04.	0002.		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Bengkalis	5 Unit	200.000.000		5 Unit	280.000.000
3.25.04.	2.	04.	0009.		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	Kab. Bengkalis	10 unit	2.358.400.000		10 unit	250.000.000
3.25.04.	2.	04.	0004.		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu)	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	152.800.000		1 dokumen	270.000.000
3.25.05.					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya		97,00%	72.000.000		97,00%	115.000.000
3.25.05.	2.	01.			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			97,00%	72.000.000		97,00%	115.000.000
3.25.05.	2.	01.	0003.		Operasi kapal pengawas perikanan	Jumlah hari operasi kapal pengawas perikanan	Kab. Bengkalis	1 Hari Operasi	72.000.000		1 Hari Operasi	115.000.000
3.25.06.					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)		43,2	614.800.000		43,2	950.000.000
3.25.06.	2.	01.			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			98,18%	71.600.000		98,18%	150.000.000
3.25.06.	2.	01.	0005.		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Kab. Bengkalis	1 dokumen	71.600.000		1 dokumen	150.000.000
3.25.06.	2.	02.			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			98,18%	121.600.000		98,18%	200.000.000

3.	25.	06.	2.	02.	0002.	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Kab. Bengkalis	3 unit usaha	121.600.000		3 unit usaha	200.000.000
3.	25.	06.	2.	03.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			98,18%	421.600.000		98,18%	600.000.000
3.	25.	06.	2.	03.	0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan usaha	Kab. Bengkalis	1000 ton	150.000.000		1000 ton	450.000.000
3.	25.	06.	2.	03.	0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Kab. Bengkalis	5 pelaku usaha	271.600.000		5 pelaku usaha	150.000.000
						JUMLAH				19.677.629.453			17.758.516.614

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan Permendagri ini telah dimulai pada perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis adalah pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2021-2026. Dinas Perikanan mengemban misi pertama yaitu :

“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian”.

Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan “Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman”, dengan sasaran “Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian Daerah”. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan Misi pertama adalah memberikan stimulus ekonomi, penyediaan sarana prasarana, pengembangan teknologi dan inovasi pendukung usaha pertanian dan perikanan.

Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian di atas, adalah dengan semaksimal mungkin mengupayakan pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang secara garis besar meliputi Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Tangkap, dan Tingkat konsumsi Ikan masyarakat.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan produksi perikanan.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program di Dinas Perikanan ;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026 sebanyak 21 kegiatan dan 52 Sub kegiatan
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 secara total sebesar Rp. 20.994.668.668,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis, Program dan kegiatan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel VI.1

Tabel IV.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun 2026

Unit Organisasi : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1					2	3
3.25.01.					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3.25.01.	2.	01.			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
3.25.01.	2.	01.	0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.25.01.	2.	01.	0006.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.25.01.	2.	01.	0007.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.25.01.	2.	02.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3.25.01.	2.	02.	0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
3.25.01.	2.	03.			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
3.25.01.	2.	03.	0002.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
						Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam 1 tahun
3.25.01.	2.	03.	0006.		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
3.25.01.	2.	05.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
3.25.01.	2.	05.	0011.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3.25.01.	2.	06.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.25.01.	2.	06.	0001.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
3.25.01.	2.	06.	0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

3.	25.	01.	2.	06.	0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
3.	25.	01.	2.	06.	0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
3.	25.	01.	2.	06.	0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3.	25.	01.	2.	06.	0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.	25.	01.	2.	06.	0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							Jumlah tenaga operator website
3.	25.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
3.	25.	01.	2.	07.	0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
3.	25.	01.	2.	07.	0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
3.	25.	01.	2.	07.	0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
3.	25.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
3.	25.	01.	2.	08.	0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
							Jumlah tenaga administrasi kantor
3.	25.	01.	2.	08.	0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
3.	25.	01.	2.	08.	0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
3.	25.	01.	2.	08.	0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
							Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun
3.	25.	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
3.	25.	01.	2.	09.	0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
3.	25.	01.	2.	09.	0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
3.	25.	01.	2.	09.	0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
3.	25.	01.	2.	09.	0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
							Jumlah tenaga kebersihan kantor

3.	25.	01.	2.	09.	0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
3.	25.	03.				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)
3.	25.	03.	2.	01.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
3.	25.	03.	2.	01.	0001.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan yang valid dan akurat
							Jumlah tenaga operator dan pendamping perikanan
3.	25.	03.	2.	01.	0002.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia
3.	25.	03.	2.	02.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
3.	25.	03.	2.	02.	0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya
3.	25.	03.	2.	02.	0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya
3.	25.	03.	2.	02.	0004.	Penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil	Jumlah sarana dan prasarana usaha nelayan skala kecil
3.	25.	04.				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)
3.	25.	04.	2.	02.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
3.	25.	04.	2.	02.	0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas
3.	25.	04.	2.	02.	0002.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan
3.	25.	04.	2.	02.	0003.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya
3.	25.	04.	2.	02.	0004.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok usaha yang memperoleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
3.	25.	04.	2.	04.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
3.	25.	04.	2.	04.	0001.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah tenaga operator dan pendamping budidaya

3.	25.	04.	2.	04.	0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3.	25.	04.	2.	04.	0009.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
3.	25.	04.	2.	04.	0004.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Jumlah tenaga analis laboratorium
3.	25.	04.	2.	04.	0010.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
3.	25.	04.	2.	04.	0012.	Perencanaan, dan Pengembangan, Pemanfaatan lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah usulan dokumen pemanfaatan dan perlindungan lahan pembudidayaan ikan
3.	25.	04.	2.	04.	0011.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang memanfaatkan air untuk pembudidayaan ikan
3.25.05.						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan dan budidaya
3.25.05.	2.	01.				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
3.	25.	05.	2.	01.	0003.	Operasi kapal pengawas perikanan	Jumlah hari operasi kapal pengawas perikanan
3.25.06.						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
3.25.06.	2.	01.				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
3.	25.	06.	2.	01.	0005.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko
3.25.06.	2.	02.				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
3.	25.	06.	2.	02.	0002.	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko

3.25.06.	2.	03.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
3.25.06.	2.	03.	0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
3.25.06.	2.	03.	0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi
3.25.06.	2.	04.		Pembinaan Teknis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Untuk Usaha Skala Mikro dan Skala Usaha Kecil	
3.25.06.	2.	04.	0001.	Pelaksanaan Pembinaan Teknis Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Teknis Usaha
3.25.06.	2.	06.		Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	
3.25.06.	2.	06.	0001.	Fasilitasi Akses Pasar dan Promosi Peningkatan Konsumsi Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	Jumlah Peningkatan Angka Konsumsi Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil
3.25.06.	2.	07.		Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	
3.25.06.	2.	07.	0001.	Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dalam Kerangka Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Untuk Usaha Skala Mikro dan Skala Usaha Kecil	Jumlah Prasarana dan Sarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang di Fasilitasi Penyediaannya
3.25.06.	2.	08.		Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan pengolahan /Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	
3.25.06.	2.	08.	0001.	Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan pengolahan /Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	Jumlah Rekomendasi Sertifikat Kelayakan pengolahan /Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil
3.25.06.	2.	09.		Revitalisasi Unit Pengolahan Ikan dan Sentral Pengolahan Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	
3.25.06.	2.	09.	0001.	Revitalisasi Unit Pengolahan Ikan dan Sentral Pengolahan Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil	Jumlah Unit Pengolahan Ikan dan Sentral Pengolahan Ikan Untuk Skala Usaha Mikro dan Skala Usaha Kecil yang di Revitalisasi

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2026.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Perikanan.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang masih memerlukan upaya keras

4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kelautan dan perikanan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2026, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bengkalis, Oktober 2025

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis,



TASRIL AKMAL, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760829 201102 1 001